

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Naufal Sany Rafi  
NPM : 1571010116  
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Februari 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Desa Sidokepong Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi secara langsung dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sudah diterapkan secara baik atau belum terlaksana secara baik oleh perangkat desa pada umumnya, mengetahui dan menganalisis langkah yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan saat implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Data yang digunakan yakni Putusan Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN.Sby, dan pendekatan konseptual dengan teknik wawancara di Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa di Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan perundangan tersebut. Hal ini dibuktikan adanya kelalaian administrasi bakal calon yang terkesan dilakukan secara serampangan tanpa dilakukan kroscek kembali, indikasi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum penyelenggara pemilihan yang ingin meloloskan beberapa bakal calon dengan memanipulasi tes penilaian bakal calon yang diserahkan tidak sesuai dengan patokan kualifikasi nilai yang telah ditetapkan, dan adanya tindakan pelanggaran hukum dikarnakan pihak panitia pemilihan yang tetap melanjutkan proses pemilihan sementara ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menerbitkan putusan Nomor 50.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. Saran yang dapat diberikan yakni bagi para peneliti selanjutnya dapat menemukan suatu penemuan baru dari penelitian-penelitian yang sama atau sejenis, mengingat akan kekacauan di dunia politik, politisi, dan perubahan sosial budaya yang masih terus menerus berkembang di dunia politik, hendaknya majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara untuk lebih teliti dan lebih tegas lagi dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan agar putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan untuk panitia pemilihan kepala desa agar senantiasa tetap lurus dalam menjadi penyelenggara pemilu sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Pemilihan Kepala Desa, Sengketa